

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut

1. Aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ternyata belum mampu memberikan perlindungan terhadap korban KDRT hal ini dikarenakan pada dasarnya UU PKDRT mempunyai dua aspek hukum yakni hukum perdata dan pidana, namun di dalam aturannya tidak terdapat satu pasalpun yang mengatur konsekuensi tindak pidana secara keperdataan sehingga aspek keperdataan dalam UU PKDRT sulit untuk diputuskan di pengadilan. Aspek keperdataan dalam konsekuensi tindak pidana sebagai contoh adalah aturan bahwa perbuatan KDRT yang dilakukan oleh suami atau istri dapat menyebabkan perceraian, sehingga apabila dikehendaki oleh korban maka pelaku dapat dijatuhi hukuman sekaligus bercerai dari pelaku.
2. Implementasinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga dalam proses persidangan belum diimplementasikan dengan baik, karena masih terdapat perlakuan kepada korban yang belum sesuai dengan undang-undang di dalam praktek penanganan dan perlindungan korban. Bentuk dari belum

diimplementasikannya UU PKDRT tersebut adalah belum adanya perintah perlindungan bagi korban oleh penyidik/pengadilan kepada LSM, belum sesuainya waktu yang dibutuhkan oleh kepolisian dalam menangani kasus KDRT yang seharusnya bisa diselesaikan kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan masih adanya keengganan korban untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya akibat ketidaktahuan tentang hukum maupun pandangan tabu oleh masyarakat bahwa sesungguhnya urusan keluarga tabu untuk diketahui oleh pihak lain.

B. Saran

1. Hendaknya aturan yang ada di dalam UU PKDRT disempurnakan dengan adanya aturan mengenai konsekuensi tindak pidana KDRT secara keperdataan sehingga korban KDRT benar-benar mendapatkan perlindungan dalam proses peradilan, sehingga korban KDRT tidak dibebani dengan proses persidangan yang berulang-ulang.
2. Hendaknya kepolisian, LSM dan pengadilan benar-benar mengimplementasikan aturan yang ada di dalam UU PKDRT dalam proses penanganan dan perlindungan korban KDRT sehingga korban benar-benar bisa mendapatkan hak-haknya secara baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al.Wisnubroto, 1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, edisi pertama, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1990, *KUHP dan KUHPA*, Rinck Cipta, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Arikha Media Cipta.
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2007.
- I Made Widyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan Keempat, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Paulus E. Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara Edisi revisi*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Suryono Sutarto, 2005, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang Undang. Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan saksi dan korban.

C. DATA INTERNET

<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html> diakses tanggal 13 Maret 2012.

Marsidin Nawawi, 2007, Lembaga Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LPK2RT),

<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2007/012007/16/0902.htm>,

<http://www.komnasperempuan.or.id/2013/09/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-hentikan-kriminalisasi-perempuan-korban-kdrt/>

<http://www.komnasperempuan.or.id/2015/03/siaran-pers-komnas-perempuan-catatan-tahunan-catahu-2014-kekerasan-terhadap-perempuan-negara-segera-putus-impunitas-pelaku/>, diunduh pada tanggal 26 februari 2015

<http://www.pabondowoso.com/berita-126-tinjauan-sosial-dan-hukum-terhadap--kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>

Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*,
<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>, Diakses pada tanggal 07 Mei
2015.





LAMPIRAN



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 18 /Ket/IX/2015/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

JEPRI ATMAJA PINEM

Nomor Mahasiswa	: 10590
Perguruan Tinggi	: UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA
Program Studi	: PERADILAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

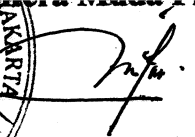
Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal
02 September 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 untuk penelitian
Skripsi yang berjudul:

**“IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 10 September 2015

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Pidana**



IMAN LISTYAWATI, SH
NIP. 19570531 198403 2 002



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket / B / 29 / IX / 2015 / RESKRIM

Kepala Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : JEPRI ATMAJA PINEM
No. Mahasiswa : 110510590
Fakultas : HUKUM
Program Studi : S1
Program Khusus : ILMU HUKUM
Alamat : JL CEPAKA PUTIH CT X.02 SLEMAN YOGYAKARTA

Yang bersangkutan telah mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara wawancara, maupun pengambilan dokumentasi sebagai syarat penyusunan Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana (S 1)

Adapun judul penelitian yang diajukan adalah :

“ IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ”

Demikian untuk menjadikan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 14 September 2015
AN. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA YKA
KASAT RESKRIM

HEBEL MUSHIMIN, S.IK
KOMPOL WRP 78051226


No : 01/07/L/RA/IX/15
Lamp : -
Hal : Surat Keterangan Penelitian

**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Hukum
Adma Jaya Yogyakarta**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Saeroni, S.Ag, M.H.
Jabatan : Manajer Divisi RTC Rifka Annisa WCC
Alamat : Jl. Jambon IV No. 69 A, Perum Jatimulyo Indah Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Jepri Atmaja Pinem
NIM : 110510590
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan tinggi : Univeritas Adma Jaya Yogyakarta
Judul Penelitian : Implentasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Telah melaksanakan penelitian berupa wawancara dan studi data di Rifka Annisa WCC pada 9 September 2015

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestiya.

Yogyakarta, 9 September 2015

RIFKA ANNISA
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
UNTUK PENGHAPUSAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Saeroni, S.Ag, M.H.
Manager Divisi RTC Rifka Annisa WCC